

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi ekonomi dan meningkatnya saling ketergantungan antarnegara tidak hanya menciptakan tantangan dan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara, tetapi juga menciptakan risiko dan ketidakpastian mengenai masa depan ekonomi global. Sebuah negara yang digambarkan sebagai miskin, biasanya dengan pendapatan per kapita yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (lebih dari 2 persen per tahun), dan sebagian besar angkatan kerja yang dipekerjakan di pertanian, jatuh ke dalam lingkaran setan kemiskinan.

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Kehidupan yang layak adalah hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konstitusi Indonesia menyatakan dalam UUD 1945 bahwa tujuannya adalah untuk "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Artinya, kehidupan yang layak tanpa kemiskinan merupakan hak dasar setiap warga negara.

Di atas segalanya, pembangunan nasional harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan.

Di Indonesia sendiri jumlah penduduk sejak 2020 tercatat sebanyak 269,603 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 27,549 juta orang pada September 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada September 2020 mencapai 10.19 persen yang mana jumlah tersebut meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Table 1.1 Jumlah Penduduk di Tanjungpinang 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	220.812
2	2020	227.663
3	2021	233.367

Sumber : Publikasi BPS Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang dalam angka.

Table 2.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tanjungpinang 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2019	19.5	9.03
2	2020	19.98	9.37
3	2021	20.85	9.57

Sumber : Publikasi BPS Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang dalam angka.

Sedangkan di Tanjungpinang sendiri jumlah penduduk yang berada di Tanjungpinang tercatat sejak 2020 sebanyak 227.663 jiwa dengan jumlah penduduk miskin di Tanjungpinang tercatat sebanyak 19.98 jiwa sejak 2020. Persentase penduduk miskin di Tanjungpinang sendiri meningkat sejak 2020, dengan

persentase jumlah penduduk miskin pada maret 2019 sebanyak 9,03 persen meningkan pada Maret 2020 sebanyak 9,37 persen pada Maret 2020.

Usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Tanjungpinang sangat serius. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Tanjungpinang dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memberdayakan UMKM, agar masyarakat Tanjungpinang bisa mandiri dalam perekonomiannya.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, serta dapat juga berperan dalam pemerataan dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang harus mendapatkan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang seluas-luasnya sebagai bentuk aksesibilitas yang kokoh terhadap kelompok ekonomi nasional. Sementara itu, di Indonesia sendiri terdapat 12 juta usaha mikro, kecil dan menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Pertama, karena banyaknya industri yang ada di semua sektor perekonomian. Kedua, memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Setiap unit investasi di sektor UMKM dapat menciptakan lapangan

kerja lebih banyak daripada investasi di perusahaan besar. Ketiga, kontribusi UMKM terhadap komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) daerah sangat besar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sumber utama pembangunan ekonomi di banyak negara *Regional Comprehensive Economic Partnership* lainnya. Di negara-negara *Regional Comprehensive Economic Partnership*, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dipedulikan daripada perusahaan besar, karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memberikan kontribusi yang sangat jelas terhadap perekonomian, seperti lebih banyaknya lapangan kerja dan bertambahnya pendapatan daerah melalui pajak. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan runtuhnya perekonomian nasional. Banyak perusahaan besar di bidang perdagangan, industri dan jasa yang bangkrut pada saat krisis ekonomi tahun 1998, namun yang cukup menarik, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan selama krisis ekonomi. Tidak hanya bertahan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) justru dapat meningkatkan perekonomian suatu masyarakat di tengah krisis ekonomi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Menurut buku Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM terdiri dari :

- a. Usaha Mikro adalah Usaha produksi milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah Kegiatan ekonomi produktif itu sendiri dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, selain anak perusahaan atau anak

perusahaan, yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari suatu perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria perusahaan kecil. Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah Perbuatan ekonomi produktif yang mandiri yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bukan merupakan afiliasi atau anak perusahaan dari suatu korporasi yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian, langsung atau tidak langsung, dari suatu korporasi kecil atau besar dengan laba bersih bruto. . Harta kekayaan atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Mengingat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak perekonomian dan pembangunan nasional, maka diperlukan suatu strategi untuk memaksimalkan potensi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini bertujuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesempatan kerja. Dengan dunia di bawah pengaruh globalisasi, perekonomian negara harus efisien, efektif dan kompetitif. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (penduduk: 237.642.326). Dengan angka tersebut diharapkan akan tercapai keseimbangan antara berbagai sektor yang mendukung pembangunan ekonomi negara.

Berdasarkan hal tersebut mengenai yang akan dikaji oleh penulis Tentang Strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & Usaha Mikro dalam pemberdayaan Usaha

Mikro di Kota Tanjungpinang. Data berikut menggambarkan jumlah penyebaran Usaha Mikro Kota Se-Tanjungpinang selama masa 5 Tahun terakhir.

Table 3.1 Jumlah Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang pada tahun 2017-2020.

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2017	3.837
2	2018	3.621
3	2019	3.843
4	2020	13.492

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang.

Akan tetapi Usaha Mikro sendiri masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya seperti, masih rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro akan pemasaran, manajemen, teknologi dan sebagainya, masih rendahnya tingkat promosi yang dilakukan usaha mikro baik didalam daerah sendiri, maupun diluar daerah, masih rendahnya akses usaha mikro terhadap permodalan dan belum optimalnya pengetahuan dari para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha. Menurut dari permasalahan-permasalahan yang di lalui oleh para usaha mikro yang ada di Tanjungpinang, Dinas Tenaga Kerja koperasi dan Usaha Mikro mengeluarkan beberapa strategi kebijakan agar Usaha Mikro tersebut bisa lebih maju dengan salah satu strategi yaitu meningkatkan kualitas pelaku dan pengelolaan usaha Mikro melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan serta fasilitasi standarisasi produk.

Berdasarkan uraian-uraian masalah pada latar belakang di atas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang”.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Sesuai dengan penjelasan permasalahan yang ada pada latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah : Bagaimana Strategi yang digunakan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan Usaha Mikro yang ada di Kota Tanjungpinang.

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Peneliti ingin mengetahui Strategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan Usaha Mikro yang ada di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang.

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu tentang bagaimana cara memberdayakan Usaha Mikro agar Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang dapat lebih berkembang secara maksimal.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan Usaha Mikro yang ada di Kota Tanjungpinang.

